

**ANALISIS ROASTING DALAM PRESPEKTIF DEMOKRASI
(STUDI ROASTING-AN KIKIY SAPUTRI TERHADAP RIDWAN KAMIL
DAN SANDIAGA UNO DI KANAL YOUTUBE INDOSIAR)**

Muhamad Yusup Rezeki Damuya¹

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email : Rezqiyusuf1515@gmail.com

ABSTRACT

The protection of freedom of opinion and expression helps ensure that citizens can provide oversight, criticism and ideas to the government, which is essential in a democratic republic. The delivery of criticism/opinion can be delivered in the form of humor/comedy which is a form of art and entertainment around the world. This research aims to analyze whether and how the roasted comedy phenomenon can be accessed on social media in Indonesia from a democratic point of view. The method used in this research is a qualitative method using an analytical descriptive approach with sources and data in the form of premier data, namely video footage of Kiky Saputri's roast of Ridwan Kamil and Sandiaga Uno at the Indosiar Anniversary event. The video footage was obtained from the Indosiar youtube channel. Meanwhile, secondary data consists of scientific journal articles and online content that can complement the work of researchers roasting Kiky Saputri, Ridwan Kamil and Sandiaga Uno. Physical data is documented using this research data collection method, while digital files including data obtained from the internet are collected and stored digitally. The research found that First, freedom of expression is the basis of democracy. Second, freedom of expression plays a role in the fight against corruption. Third, freedom of expression promotes accountability. Fourth, freedom of expression in society is believed to be the best way to find the truth.

Keywords: Roasting, Democratic.

ABSTRAK

Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi membantu memastikan bahwa warga negara dapat memberikan pengawasan, kritik, dan gagasan kepada pemerintah, yang merupakan hal yang penting dalam sebuah republik demokratis. Penyampaian kritik/pendapat dapat disampaikan dalam bentuk humor/komedi yang merupakan salah satu bentuk seni dan hiburan diseluruh dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah dan bagaimana fenomena komedi yang dipanggang dapat diakses di media sosial di Indonesia dari sudut pandang demokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif analitik dengan sumber dan data berupa data premier yaitu cuplikan video roastingan Kiky Saputri terhadap Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno dalam acara HUT Indosiar. Cuplikan video tersebut peneliti peroleh dari kanal youtube Indosiar. Sedangkan data sekunder terdiri dari artikel jurnal ilmiah dan konten online yang dapat melengkapi karya peneliti pemangngangan Kiky Saputri, Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno. Data fisik didokumentasikan menggunakan metode pengumpulan data penelitian ini, sedangkan file digital termasuk data yang diperoleh dari internet dikumpulkan dan disimpan secara digital. Dari penelitian ditemukan bahwa Pertama, kebebasan berekspresi menjadi dasar dari adanya demokrasi. Kedua, kebebasan berekspresi berperan dalam pemberantasan korupsi. Ketiga, kebebasan berekspresi mempromosikan akuntabilitas. Keempat, kebebasan berekspresi dalam masyarakat dipercaya merupakan cara terbaik menemukan kebenaran.

Kata Kunci: Roasting, Demokrasi.

PENDAHULUAN

Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan hak atas kebebasan berpendapat yang telah menjadi asas demokrasi Indonesia sejak negara ini merdeka pada tahun 1945 berkat jaminan yang diberikan dalam Pasal 28E ayat (3). Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan kebebasan sudah ada sebelum berdirinya bangsa ini. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi membantu memastikan bahwa warga negara dapat memberikan pengawasan, kritik, dan gagasan kepada pemerintah, yang merupakan hal yang penting dalam sebuah republik demokratis. Seseorang tidak dapat menyangkal hak yang tidak dapat dicabut atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan berekspresi atas keyakinan dan pendapatnya. Hak untuk mengutarakan pendapatnya secara bebas merupakan landasan masyarakat demokratis yang fungsional. Kebebasan untuk berkumpul, mengutarakan pendapat, dan berdebat secara terbuka merupakan ciri-ciri negara demokratis. (Tilly, 2007:8).

Penyampaian kritik/pendapat dapat disampaikan dalam bentuk humor/komedi yang merupakan salah satu bentuk seni dan hiburan diseluruh dunia. Pancaran Sinar Petromak (PSP), Sersan Prambors, dan Warkop DKI adalah tiga ansambel parodi pertama yang menggunakan komedi untuk menyampaikan kritik. Sejak masa kanak-kanak komedian, budaya kritis telah tumbuh di sekitar bentuk seni. (Rudy Badil, 2010, p. 33). Perkembangan dunia komedi saat ini muncul dengan adanya istilah roasting.

Roasting merupakan istilah yang sering digunakan dalam komedi, dimana individu atau kelompok melakukan kegiatan komunikasi dengan melontarkan lelucon namun disisipkan kalimat sindiran, kritik satir, atau candaaan secara tajam terhadap orang lain secara langsung dihadapannya(Putsanra, 2021). Karena Indonesia memiliki selera humor yang tinggi, roasting adalah praktik umum di sana, dan sering kali digunakan untuk mengungkapkan kritik terhadap masalah masyarakat sehubungan dengan tokoh yang menjadi sasaran lelucon. Banyak ide untuk roasting datang dari peristiwa terkini, baik yang bersifat sosial, politik, atau hukum. Kebebasan mengkritik isu-isu sosial, politik, dan hukum sambil tetap memberikan kesenangan inilah yang menjadikan komik sebagai pelampiasan yang bagus untuk menghilangkan stres.(Wijana, 2004:12)

Di Indonesia komika yang mempunyai keterampilan roasting diantaranya Bintang Emon, Pandji Pragiwaksono, Kiky Saputri, Bokir Boris, Ernest Prakarsa. Kiky Saputri

adalah seorang komedian Indonesia yang terkenal karena keberanian dan keahliannya dalam mengolok-olok tokoh-tokoh penting pemerintahan. Rizhky Nurasy Saputri, nama lengkap komedian wanita ini mengawali kariernya di Stand-Up Comedy Acamedy (SUCA) 4. Kiky Saputri mendapatkan julukan “Queen Of Roasting”, popularitasnya meningkat kerana keberaniannya mengkritisi pejabat negara melalui roasting stand-up comedy (Yarda, 2022).

Gambar 1 Kiky Saputri Roasting Aktor Politik



(Sumber: Cirebon.Tribunnews 2019)

Adapun para pejabat yang pernah menjadi target roasting Kiky Saputri seperti Anies Baswedan, Erick Thohir, Susi Pudjiastuti, Sri Mulyani, Retno Marsudi, Rudiantara, Hanif Dhakiri, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno dan Fadli Zon di berbagai stasiun televisi. Totalitasnya dalam me-roasting para pejabat negara secara langsung membuat viral didunia maya. Potongan video roasting Kiky Saputri dapat diakses oleh netizen diberbagai sosial media seperti youtube, Tiktok, Instagram, Facebook dan Twitter.

Hal yang menarik di awal tahun 2023. stasiun televisi Indosiar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Indosiar ke 28, di momen Konser Raya 28 tahun Indosiar LUA28IASA mengkonsepkan acara dengan penampilan roasting Kiky Saputri terhadap Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno. Menariknya dalam roastingan Kiky Saputri di Konser Raya 28 Tahun Indosiar LUA28IASA tersebut Kiky Saputri menyinggung soal Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang mana Ridwal Kamil dan Sandiaga Uno bakal maju

sebagai bakal calon presiden 2024. Persaingan Bakal Calon Presiden dan Bakal Cawapres 2024 menjadi topik yang sangat menarik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dalam melakukan roasting terhadap pejabat negara tentu sangat beresiko terlebih adanya hukum yang mengatur tentang penyebaran informasi dalam era digitalisasi. Ada kekhawatiran bahwa hal ini berkaitan dengan masalah pribadi, seperti kinerja pejabat yang buruk atau ketidakmampuannya menghadapi tantangan dalam perannya. Namun Kiky Saputri menyajikannya dengan gaya yang baru, kocak, dan sarkastik, sehingga alih-alih terkesan menghakimi, penonton malah dibuat terhibur. Satirical roasting adalah jenis komunikasi yang pesannya bersifat satir atau ironis, namun tidak sarkastik.

Mayoritas komedinya ditujukan kepada otoritas negara, dan pada hakikatnya merupakan kritik sosial terhadap realitas sosial, politik, dan hukum yang sebenarnya di Indonesia. Pada kenyataannya, tidak disarankan untuk menyuarakan ketidaksetujuan terhadap pemerintah di forum publik, melainkan bertemu dengan pejabat terkait secara pribadi. Kritik tidak boleh memicu permusuhan, hinaan, atau perusakan gedung-gedung publik, namun di era media sosial saat ini, hal ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Selain itu, memimpin pemberontakan meski pemerintah melakukan kesalahan. Ini adalah praktik yang sangat terlarang.

Terkhusus negara demokrasi seperti Indonesia, kritik sosial terhadap para penguasa negara sangat diperlukan bahkan mampu menghidupkan makna demokrasi yang sebenarnya. Kritik sosial dalam pandangan demokrasi sangat penting untuk memastikan perkembangan dan keberlanjutan sistem demokrasi itu sendiri. Kritik yang dilontarkan kepada pejabat publik sebagai bentuk menyadarkan pejabat publik untuk melakukan evaluasi kinerjanya guna untuk mencegah kekuasaan yang berlebihan. Dalam sistem demokrasi yang sehat, pejabat publik harus sadar, terbuka, dan mematuhi aturan hukum dan batasan kekuasaan yang telah ditetapkan oleh konstitusi.

Berdasarkan hal tersebut, pada masyarakat demokratis seperti Indonesia, tindakan Kiky Saputri termasuk dalam perlindungan hak kebebasan berpendapat. Terlebih saat ini di era digitalisasi, penyebaran informasi sangat cepat dan luas. Selain itu, hal ini juga didukung oleh peranan media massa yang telah memberikan ruang untuk siapapun yang berkenan menyuarakan pendapatnya termasuk dari kalangan selebritis maupun masyarakat lainnya sehingga mampu mewakili suara masyarakat yang enggan atau merasa

takut untuk mengutarakan pendapat/kritiknya kemudian mendistribusikannya kepada khalayak.

Dapat dilihat, saat ini kebebasan berpendapat dan kebebasan pers sejalan untuk meningkatkan nilai demokrasi. Umumnya dikatakan bahwa lelucon komedian hanya berdampak pada publik, namun tidak berdampak pada pemerintah, namun tidak ada bukti yang mendukung hal ini. Untuk alasan yang sama, kritik ini diambil dengan humor yang bagus. Padahal pesan yang disampaikan dalam kritik ini mencerminkan konsensus masyarakat di saat krisis demokrasi dan menurunnya independensi media. Sebab validitas media baik cetak maupun elektronik sebagai alat komunikasi massa masih menjadi perdebatan.

Bagaimana mungkin dari dulu hingga sekarang, media massa tidak pernah lepas dari perhatian masyarakat, terutama ketika peristiwa-peristiwa tertentu seperti peristiwa politik (pemilihan umum), peristiwa ekonomi, peristiwa budaya, dan peristiwa hukum terjadi. Masyarakat tertentu berpendapat bahwa penilaian terhadap pemberitaan suatu kejadian di media tertentu terkadang kurang obyektif. Beberapa media dipandang lebih memihak satu kelompok dibandingkan kelompok lain ketika memberitakan berita.

Dalam konteks analisis roasting, penelitian ini akan meneliti sejauh mana roasting ini menjadi sarana partisipasi publik dalam memberikan tanggapan/komentar kepada aktor politik dalam negara demokrasi. Peneliti akan melihat bagaimana pers, pemerintah dan publik dalam meningkatkan nilai demokrasi di Indonesia. Sehingga dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti fenomena tersebut.

A. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah metode yang menyelidiki kondisi objek alam dan melibatkan peneliti sebagai alat utama, penggunaan berbagai sumber informasi untuk mengumpulkan data, analisis data induktif, dan pengutamaan makna di atas generalisasi statistik. (Sugiyono, 2018: 9). Penelitian deskriptif analitik digunakan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran mengenai hal yang diteliti dengan menggunakan data atau sampel yang diperoleh dalam

bentuk mentahnya, tanpa adanya analisis untuk menarik kesimpulan yang luas.(Sugiyono, 2018:76)

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode analisis konten media untuk mengevaluasi secara langsung cuplikan video Kiky Saputri yang mengejek dan mengejek tokoh politik. Dalam penelitian ini digunakan data primer dan data sekunder, dimana data primer dalam penelitian ini berupa cuplikan video roastingan Kiky Saputri terhadap Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno dalam acara HUT Indosiar. Cuplikan video tersebut peneliti peroleh dari kanal youtube Indosiar. Sedangkan data sekunder merupakan informasi tambahan yang dapat digunakan peneliti untuk meningkatkan keakuratan dan ketepatan analisis data primernya.

Data sekunder penelitian ini terdiri dari artikel jurnal ilmiah dan konten online yang dapat melengkapi karya peneliti pemanggangan Kiky Saputri, Ridwan Kamil dan Sandiaga. Data fisik didokumentasikan menggunakan metode pengumpulan data penelitian ini, sedangkan file digital termasuk data yang diperoleh dari internet dikumpulkan dan disimpan secara digital. Untuk memahami secara utuh cuplikan Kiky Saputri terhadap Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno di channel YouTube Indosiar, peneliti menggunakan pendekatan analisis konten kualitatif ini untuk mencari, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis seluruh materi video tersebut.

Gambar 2 Teknik Content Analysis



(Sumber : Diolah oleh Peneliti)

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk melaksanakan kontrol warga negara (kedaulatan) atas bagaimana negara mereka diatur, beberapa negara telah mengadopsi bentuk atau mekanisme pemerintahan yang demokratis. Prinsip trias politica menjadi landasan demokrasi karena menyerukan pemisahan tiga cabang pemerintahan (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) dan

perwujudannya dalam tiga jenis lembaga negara yang berbeda namun paralel (Herry Priyono, dkk., 2012). Ketiga cabang pemerintahan ini perlu selaras dan independen satu sama lain agar dapat saling melakukan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan konsep checks and balances.

Ada tiga jenis lembaga negara: lembaga yang mempunyai kekuasaan eksekutif (seperti lembaga eksekutif pemerintahan), lembaga yang mempunyai kekuasaan kehakiman (misalnya pengadilan), dan lembaga yang mempunyai kekuasaan legislatif (misalnya DPR di Indonesia). Keputusan legislatif diambil oleh rakyat atau oleh wakil-wakil yang bertanggung jawab kepada masyarakat yang dilayaninya (konstituen) dan yang diwakilinya melalui proses pemilihan umum legislatif, serta kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui pemilulah banyak pilihan atau hasil penting diperoleh, termasuk terpilihnya presiden suatu negara. Tidak semua warga negara wajib memilih dalam pemilu nasional, namun mereka yang berhak dan ingin melakukannya melakukannya dengan sukarela.

Perlu diketahui juga bahwa tidak semua warga negara mempunyai hak untuk memilih. Ketika kita berbicara tentang “kedaulatan rakyat,” yang kita maksud bukan hanya hak rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri dalam pemilu. Hak memilih presiden secara langsung hanyalah salah satu contoh kedaulatan rakyat, dan hak memilih langsung anggota parlemen hanyalah salah satu contoh kedaulatan rakyat terhadap lembaga legislatif.

Pemilihan umum sering disebut sebagai pesta demokrasi meskipun peranannya sangat kecil dalam sistem demokrasi. Hal ini merupakan kesalahan dari kepercayaan kuno yang dianut oleh sebagian orang, yang memandang wujud ideal seorang ratu cantik—seorang berhala—dan bukannya pemerintahan yang fungsional. Bahkan, pemimpin negara yang paling efektif sekalipun akan mempunyai masa hidup yang jauh lebih pendek dibandingkan dengan sistem yang telah terbukti mampu membangun suatu bangsa. Di banyak negara demokrasi, hak untuk memilih dibatasi hanya pada orang-orang yang telah mencapai usia tertentu (seringkali 18 tahun) dan tidak memiliki riwayat kriminal (seperti pernah atau pernah dipenjara).

Demokrasi pertama kali muncul pada abad ke-5 SM di Athena, dan nama “demokrasi” berasal dari sana. Sistem hukum negara ini sering disebut-sebut sebagai

model awal perkembangan hukum demokrasi kontemporer. Namun, pengertian kontemporer dari frasa ini telah berkembang pada abad ke-18, bertepatan dengan kebangkitan sistem politik "demokratis" di banyak negara. (Diane Revitch, 2005). Istilah "demokrasi" berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti "rakyat" dan kratos/cratein yang berarti "pemerintahan", sehingga berarti "pemerintahan rakyat" atau "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk". orang orang." Dalam kajian politik, istilah "demokrasi" diperlakukan sebagai istilah tersendiri. Hal ini masuk akal, mengingat kemajuan politik sering kali diukur dari sejauh mana suatu negara telah mengadopsi demokrasi.

Kekuasaan negara yang diterima dari rakyat juga harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kemakmuran rakyat, oleh karena itu demokrasi sangat penting dalam pembagian kekuasaan dalam suatu bangsa (seringkali didasarkan pada cita-cita dan prinsip trias politica). Mengingat kekuasaan pemerintah (eksekutif) belum pernah sebesar ini, tidak mampu menciptakan masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut yang ada di tangan pemerintah seringkali berujung pada pelanggaran hak asasi manusia, prinsip-prinsip seperti trias politica. mengambil arti yang lebih besar. Demikian pula, jika lembaga legislatif mempunyai kewenangan yang tidak terkendali untuk menetapkan anggarannya sendiri untuk gaji dan fasilitas anggotanya tanpa mempertimbangkan harapan masyarakat, maka hal ini tidak akan menguntungkan mereka. Artinya, lembaga negara tidak cukup hanya bertanggung jawab; sebaliknya, harus ada proses formal yang mencerminkan tanggung jawab tersebut dan mampu secara praktis (dan bukan hanya secara teoritis) membatasi kewenangan organisasi tersebut.

Berbeda dengan uraian landasan teori tentang pemanggangan pada bab kedua, definisi ini mengambil istilah tersebut begitu saja, mendefinisikannya sebagai sejenis komedi di mana satu orang menyampaikan lelucon dengan tujuan untuk menghibur lebih banyak penonton. Hal-hal seperti itu digunakan untuk mengolok-olok orang lain dengan cara yang unik dalam pertunjukan standup comedy. Pertunjukan semacam itu bisa berkisar dari penghormatan yang tulus hingga rutinitas komedi yang pedas. "roast" mungkin menanggapi lelucon dengan komedi, memberikan kritik yang membangun, atau bahkan hinaan yang tidak dimaksudkan untuk dianggap serius.

Teman, pendukung, dan masyarakat umum mengelilingi seseorang selama acara publik, dan mereka mungkin mendapat perlakuan yang sama. Istilah "memanggang" digunakan untuk menggambarkan lelucon dan pertunjukan. Pembawa acara disebut mengolok (toaster, plesetan adalah toastmaster). Siapapun yang diejek dengan cara ini dianggap "dipanggang". Tindakan yang dimaksudkan untuk mengejek ini mendapat reaksi balik dari beberapa orang yang menganggapnya sebagai semacam penindasan maya. Memanggang, praktik mengejek orang lain di depan umum karena menimbulkan efek komedi, telah menimbulkan kontroversi yang lebih besar. Para pelaku roaster seperti Kiky Saputri yang pernah mengejek Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno di channel YouTube Indosiar menegaskan bahwa proses roasting memang memerlukan izin dari pihak target.

Gambar 3 Kiky Saputri Roasting Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno



(Sumber: Youtube Indosiar 2023)

Sesuai dengan seperangkat prinsip etika yang dikenal sebagai "tanggung jawab sosial", manusia mempunyai kewajiban untuk membantu generasi mendatang yang akan bertanggung jawab menjaga planet yang mereka tinggalkan. Mempertahankan keseimbangan yang sehat antara ekonomi dan ekologi adalah tugas semua anggota masyarakat. Mungkin ada kompromi antara pertumbuhan ekonomi material dan nilai-nilai masyarakat dan lingkungan.

Dalam pengaplikasian Teori Tanggung Jawab Sosial dalam penelitian ini, peneliti menginterpretasikan Roasting Kiky Saputri terhadap Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno di

Kanal Youtube Indosiar dengan fungsi pers yang menjadi indikator dalam penelitian ini. Kemudian peneliti akan menganalisa dan memverifikasi analisa tersebut hingga mendapatkan kesimpulan yang relevan. Karena kapasitas otonomi ada pada setiap manusia, kebebasan dapat dianggap sebagai fenomena global. Kebebasan manusia dapat dipecah menjadi beberapa sub-konsep, terutama kebebasan berekspresi, privasi, dan berserikat. (Mill 2005: 22). Pertama, Kebebasan hati nurani, dalam definisi terluasnya, mengacu pada isu-isu yang berkaitan dengan kekuatan kesadaran batin, yang merupakan hal mendasar dalam konsep kebebasan manusia. Hal ini terkait dengan hak atas kebebasan berpikir, kebebasan berbicara, dan hak untuk mengejar cita-cita sendiri dalam hidup. Fokus diskusi mengenai kebebasan berpendapat ini adalah pada proses mental dan bukan pada norma-norma sosial. Kedua, kebebasan untuk menentukan arah hidupnya dan menerima hasilnya, baik positif maupun negatif, selama tidak merugikan orang lain. Ketiga, kebebasan untuk bergabung dengan orang lain dalam lingkungan sosial tanpa campur tangan negara.

Kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berserikat bukanlah hal yang asing dalam kerangka hubungan kemanusiaan di media digital. Unsur manusia sebagai pemain dalam ekosistem media digital disorot dari sudut pandang yang digunakan untuk menguraikan hal ini. Dengan demikian, nilai yang muncul dari media digital tidak terlepas dari fungsi para pelaku di baliknya, padahal media digital sendiri merupakan produk fisik.

Hal ini diterapkan dalam lingkungan jurnalisme digital melalui hubungan antara pelaku ekosistem dan media digital. Misalnya, metode yang digunakan jurnalis untuk menyebarkan informasi melalui media sosial, peran yang dimainkan oleh editor dan masyarakat umum dalam gatewatching, atau cara Chief Operating Officer (COO) menciptakan lingkungan yang ramah pada platform berita yang diawasinya. Kebebasan merupakan hal mendasar dalam masyarakat demokratis karena kebebasan mendorong diskusi politik dan peran pemerintah dalam kehidupan sehari-hari secara terbuka dan jujur (Vincenzo, 2008). Oleh karena itu, kebebasan memainkan peran penting dalam berfungsinya masyarakat demokratis. Menurut John Stuart Mill yang mengembangkan kasus utilitarian untuk kebebasan, “prinsip dasar yang paling sederhana sebagai satu-

satunya tujuan yang dijamin oleh manusia, baik secara individu maupun kolektif, adalah mengenai kebebasan bertindak yang berkaitan dengan perlindungan diri,” (Mill 2005).

Dalam demokrasi liberal, setiap orang harus diberi hak untuk bebas berekspresi. Klaim Mill bahwa setiap orang mempunyai kebebasan berpikir yang melekat mendasari pembelaannya terhadap kebebasan berpendapat. Hak kebebasan berpendapat tidak boleh dilanggar, ujarnya (Mill 2005; Miller 2010). Pandangan empiris Mill bahwa manusia tidak memiliki wawasan apriori langsung terhadap realitas membenarkan perlunya menjaga opini seseorang tetap terbuka terhadap perubahan berdasarkan bukti baru yang memberikan landasan filosofis untuk hal ini. Kebebasan berpendapat memungkinkan individu melakukan lebih dari sekedar menyuarakan pikiran dan perasaannya di depan umum; hal ini juga memberi mereka suara untuk mempengaruhi dan bahkan mengubah mereka yang mempunyai otoritas. Jurnalisme menggunakan teknik ini sebagai anjing penjaga. Locke berpendapat bahwa masyarakat memerlukan kebebasan berpendapat untuk melindungi diri dari pemimpin yang korup dan diktator. (O’Rourke 2003).

Dalam masyarakat bebas, individu dan kelompok bebas mencari, menerima, berdebat (mendukung atau mengkritik), dan menyebarkan informasi dalam upaya mengetahui kebenaran. Dalam konteks ini, jurnalis dipandang sebagai orang yang mempunyai akal sehat dan logika untuk menyampaikan berbagai informasi yang benar dan faktual kepada publik, bukan sekedar anggota platform media yang memiliki tujuan sosial. Mill melanjutkan dengan mengatakan bahwa setidaknya ada tiga kriteria yang harus dipenuhi sebelum orang dapat berbicara dengan bebas di masyarakat tanpa takut akan pembalasan dari pemerintah. (O’Rourke 2003).

Kebebasan ini berlaku dimana saja. Karena Deklarasi Hak Asasi Manusia berasal dari negara-negara barat, dengan Amerika dan Eropa sebagai pusatnya, maka universalitasnya tidak hanya mengacu pada hal-hal yang bersifat geografis saja. Semua negara yang menjadi anggota PBB harus memperhatikan hal ini. Penting untuk melihat universalitas ini tidak hanya mencakup media cetak dan penyiaran, yang merupakan cikal bakal media modern, namun juga media digital; norma kebebasan berpendapat yang termasuk dalam kebebasan pers berlaku pada semua bentuk komunikasi. Meskipun perbedaan karakter media tidak secara substansial mengubah makna kebebasan pers,

namun karakter media memerlukan analisis lebih lanjut karena melahirkan klasifikasi kebebasan yang bervariasi.

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan pada bab pembahasan di atas tentang Perspektif Demokrasi tentang Analisis Roasting Kiky Saputri Terhadap Ridwan Kamil Dan Sandiaga Uno Di Kanal Youtube Indosiar adalah Pertama, kebebasan berekspresi menjadi dasar dari adanya demokrasi. Kehidupan demokratis mengandaikan kesetaraan informasi yang dijamin melalui kebebasan berpendapat, memperoleh informasi, dan mengemukakan ide di muka umum. Kedua, kebebasan berekspresi berperan dalam pemberantasan korupsi.

Korupsi merupakan penyakit yang menjadi penghalang kehidupan sosial kemasyarakatan yang demokratis, karena korupsi berarti mengkhianati amanah yang disepakati bersama. Adanya kebebasan berekspresi menjadi garansi bahwa pilar-pilar dalam kehidupan demokrasi saling menjaga untuk mewujudkan tatanan sosial. Ketiga, kebebasan berekspresi mempromosikan akuntabilitas. Keempat, kebebasan berekspresi dalam masyarakat dipercaya merupakan cara terbaik menemukan kebenaran. Keempat inilah yang secara manifes melekat pada diri jurnalis sebagai bagian dari ekosistem jurnalisme digital. Pasalnya, kebebasan berekspresi melekat pada diri individu.

Selain itu, peneliti mengemukakan saran untuk menjadi perbaikan dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif, Libatkan diri dalam politik dengan aktif berdiskusi, memilih, dan berpartisipasi dalam kegiatan politik di masyarakat. Edukasi diri sendiri, tingkatkan pemahaman politik anda melalui bacaan, diskusi, atau kursus politik. Etika online, saat berkomunikasi di media sosial, ingatlah untuk berkomunikasi dengan etika, hormat, dan integritas.
2. Saran Kepada Pemerintah
 - Regulasi yang Diperlukan: Pertimbangkan untuk mengembangkan regulasi yang relevan terkait konten politik di media sosial untuk mengendalikan disinformasi dan retorika yang merusak.

- Transparansi Media Sosial: Dorong platform media sosial untuk menjadi lebih transparan tentang cara mereka mengelola konten politik dan mengatur algoritma mereka.
- Pendidikan Media Sosial: Tingkatkan literasi media sosial dalam pendidikan formal dan informal untuk membantu masyarakat memahami cara berperilaku dan berinteraksi di platform ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Nuro Uqtura. (2019). Jokes(Set Up dan Puchline) dalam Wacana Humor Komika Popon Kerok Acara Stand Up Comedy Indonesia(SUCI)8 di Kompas TV. In *Universitas Negeri Semarang*.
- Burhan Bugin. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Fronqi Bella Enrin. (2021). Representasi Kritik Melalui Humor Dalam Media Digital Youtube di Chanel Majelis Lucu Indonesia. *Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam Al-Ittishol*, 2(2), 110–123.
- Komariah, D. S. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV. Alfabeta.
- Mitang, M. P. (2020). Wacana Humor Kritik Sosial dalam Stand Up Comedy Indonesia Season 4 di Kompas TV: Tinjauan Pragmatik. *Sintesis*, 14(1), 78–93.
<https://doi.org/10.24071/sin.v14i1.2283>
- Putsanra, D. V. (2021). *Arti Roasting dalam Stand Up Comedy yang Viral Karena Kiky Saputri*. Tirto.Id.
- S. Siebert, Fred, Peterson, Theodore, & Schraamm, W. (1986). *Empat Teori Pers*. Intermasa.
- Shuyen. (2023). *Sindiran Politik Di Ruang Publik Dalam Perspektif Demokrasi (Studi Kasus Program Laporan Pak Trans 7)*. UIN Raden Fatah Palembang.
- Sihombing, L. H., Adzra, F. M., & Rahadi, R. (2021). *ANALYSIS OF KIKY SAPUTRI 'S ROASTING : CRITIQUES*. 9(May), 25–36.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Alfabeta, Ed.).
- Tilly, C. (2007). *Democracy*. Cambridge University Press.

- Wijana, D. P. (2004). . *Kartun: Studi tentang Permainan Bahasa*. Ombak.
- Yarda, V. (2022). *Kiky Saputri Bongkar Perjuangan Sebagai Komika Roasting: Nggak Spontan*. Bangka.Tribunnews. <https://bangka.tribunnews.com/2022/11/12/kiky-saputri-bongkar-perjuangan-sebagai-komika-roasting-nggak-bisa-spontan>
- Salsabila Aulia. (2020). “Aplikasi Tiktok Dapat Memberikan Manfaat Bagi Penggunaanya.” <https://kumparan.com>. Diambil (<https://kumparan.com/salsabila-aulia/aplikasi-tiktok-dapat>
- Viva Budy, Kusnandar. (2023). “10 Negara Pengguna TikTok Terbesar di Dunia, Indonesia Juara Dua.” Katadata.co.id. Diambil 24 Maret 2023 (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/11/10-negara-pengguna-tiktok-terbesar-di-dunia-indonesia-juara-dua>).
- https://www.tiktok.com/@sukamakan_14/video/7187608168069991685?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7275704118809937409
- Sarbaini, Sarbaini. (2014). “Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum.” INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum 7(3).
- Sari, Lidia Indah. (2021). “Analisis Ujaran Kebencian Bahasa di Media Sosial TikTok.” UMSU.